SUMBER : PK
TGL : 31/12-95
HALAMAN : 6

RK. 31-12-6

Buruh, Politik, dan Industrialisasi

Vedi R. Hadiz



Sejak 1990, pusat-pusat industri manufaktur di Indonesia telah digoncang gelombang pemogokan. Meski sebagian besar pemogokan terjadi di sekitar wilayah Jabotabek, pusat industri manufaktur terpenting di negeri ini, belakangan gelombang pemogokan menyebar sampai ke Medan dan Jatim. Keadaan ini sangat bertolak belakang dengan "ketenangan" yang menandai hubungan perburuhan di Indonesia sejak awal 1970-an, ketika berbagai jenis kontrol dikenakan oleh negara terhadap pengorganisasian buruh. Memang "ketenangan" tersebut sempat terganggu gelombang pemogokan sporadis di akhir 1970-an dan awal 1980-an, ketika terjadi PHK masal atas buruh di berbagai pabrik karena resesi. Namun gelombang pemogokan dewasa ini mempunyai arti yang lebih penting karena beberapa alasan yang akan dibahas di bawah ini.

Tabel: Pemogokan Buruh di Indonesia

Tahun	Jumlah Pemogokan
1988	39
1989	19
1990	61
1991	114
1992	251
1993	156 (sampai Oktober)

Sumber: *Chris Manning 1993 dan data pemerintah di berbagai surat kabar.*

Pertama, meningkatnya aksi pemogokan selama beberapa tahun terakhir ini bermakna khusus mengingat usaha pemerintah mengembangkan ekspor nonmigas sejak pertengahan 1980-an, karena jatuhnya harga minyak di pasar internasional. Ekspor produk industri manufaktur ringan sangat penting bagi keberhasilan usaha tersebut, sedangkan "keunggulan komparatif" sektor itu dianggap terletak pada tersedianya angkatan kerja melimpah yang murah, dan tak kalah penting, patuh secara politik.

Pentingnya ekspor sektor manufaktur untuk masa depan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dalam data-data ekonomi makro. Misalnya, menurut Bank Dunia, sektor manufaktur mempunyai andil 45% dari keseluruhan ekspor Indonesia dewasa ini, dan 16% dari GDP. Menurut taksiran lembaga internasional tersebut, pada tahun 2000 andil sektor manufaktur akan mencapai 65% dari ekspor dan 23% dari keseluruhan GDP kita (data dari laporan Bank Dunia 1993).

Buruh dan perubahan sosial

Aksi pemogokan belakangan ini justru telah berpusat pada jenis-jenis industri yang menyumbang banyak pada peningkatan andil sektor manufaktur ekspor. Sebut saja industri tekstil, garmen dan sepatu, jenis-jenis industri yang juga andalan negeri-negeri seperti Korea Selatan dan Taiwan ketika mulai menggalakkan strategi industrialisasi berorientasi ekspornya tahun 1960-an. Menurut pengamat perburuhan, di Jawa Barat, 74% pemogokan terjadi dalam pabrik tekstil dan garmen, sementara 12% lain terjadi dalam pabrik sepatu dan kulit.

Persoalannya, mengapa gelombang pemogokan buruh justru terjadi sekarang? Mengapa berbagai jenis kontrol terhadap pengorganisasian perburuhan, yang telah dikenakan sejak awal 1970-an, tampak kurang memadai untuk mengatasi masalah ini secara mulus? Apakah gelombang pemogokan buruh ini pertanda perlunya pembaharuan mendasar dalam penataan hubungan perburuhan kita? Sejauh manakah pemerintah bersedia menempuh pembaharuan seperti ini, dan perhitungan-perhitungan ekonomi dan politik apa yang mungkin menghambat pembaharuan hubungan perburuhan?

Pada dasarnya, gelombang pemogokan buruh belakangan ini adalah pencerminan dari perubahan-perubahan mendasar masyarakat Indonesia sebagai hasil industrialisasi yang pesat selama dua setengah dasawarsa ini. Di antara perubahan itu adalah perkembangan, secara perlahan, tapi pasti, sebuah golongan buruh industri yang kesadarannya makin dibentuk pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kehidupan di pusat-pusat industri, baik itu di pabrik, maupun dalam komunitas-komunitas buruh yang makin kentara kehadirannya di pinggiran kota.

Tahun 1971 jumlah pekerja dalam sektor manufaktur di Indonesia 2,7 juta, mencakup 6,5% dari keseluruhan angkatan kerja. Tahun 1980 jumlah itu mencapai 4.4 juta orang, 8,5% dari keseluruhan angkatan kerja. Tahun 1990, 8,2 juta orang dipekerjakan di sektor manufaktur, mencakup 11,6% dari keseluruhan angkatan kerja. (data-data dari laporan Bank Dunia, 1993). Ciri dasar dari perkembangan industri-industri manufaktur ringan di Indonesia, dan juga sebelumnya di Korea Selatan dan Taiwan, adalah dipekerjakannya buruh wanita dalam jumlah sangat besar.

Juga secara perlahan tapi pasti, muncul kesadaran baru di kalangan buruh karena perubahan-perubahan dari proses industrialisasi itu sendiri. Karena tempaan pengalaman hidup di kota atau pinggiran kota buruh industri dewasa ini jadi jauh lebih "urban" dalam kesadaran maupun kehidupan sehari-harinya dibanding pekerja lima belas atau dua puluh tahun lalu.

Bagi seorang buruh masa kini kemungkinan kembali menetap di desa bila "kalah" dalam pertarungan nasib di kota, semakin kecil, karena desa tak lagi memberikan tempat "perlindungan" memadai. Implikasinya, para buruh akan merasa bahwa nasib mereka benar-benar ditentukan perjuangan untuk memperbaiki kondisi dan kerja di kota dan di pabrik. Dengan demikian, secara alamiah muncullah kesadaran bahwa mereka perlu memperjuangkan hak-hak mereka, meskipun harus berhadapan dengan berbagai kontrol ketat. Dapat ditambahkan bahwa tingkat pendidikan buruh umumnya sekarang lebih baik daripada di masa lalu. Ini juga menunjang munculnya pemahaman seperti itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa telah berkembang kondisi-kondisi objektif maupun subjektif yang menyumbang pada peningkatan aktivisme dan pengorganisasian buruh, meski masih dalam kadar terbatas. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa perkembangan tersebut adalah produk langsung, dan mungkin tak terhindarkan, dari kemajuan industrialisasi selama ini.

Penataan hubungan perburuhan

Penataan hubungan perburuhan dewasa ini di Indonesia berakar pada situasi sosial, politik dan ekonomi awal 1970-an. Dalam penataan hubungan perburuhan tersebut, hanya ada satu organisasi buruh yang didukung negara, SPSI. Sebenarnya, implikasi hal ini adalah pembatasan hak berserikat. Lebih jauh lagi, dengan berlakunya konsep Hubungan Industri Pancasila sejak pertengahan 1970-an, hak mogok, yang masih tercantum dalam undang-undang perburuhan, juga dibatasi karena pemogokan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan yang dianggap terkandung dalam HIP.

Berkembangnya pembatasan-pembatasan itu harus dikaitkan dengan suasana politik nasional awal 1970-an. Pada waktu itu ideologi "pembangunanisme" — bahwa stabilitas sosial dan politik perlu dipelihara atas segala-galanya sebagai prasyarat keberhasilan ekonomi — sedang sangat berpengaruh di kalangan pembuat kebijaksanaan negara. Karena